

# DAFTAR ISI

1. *Public Private Community Partnership* dalam Pembangunan Terminal Transit Paso Kota Ambon  
**MIKE J. ROLOBESSY** \_\_\_\_\_ **1-15**
2. Peran Komunikasi dan Penggunaan Media Massa pada Kelompok Peternak Sapi di kabupaten Maluku Tenggara  
**VRANSISCA KISSYA** \_\_\_\_\_ **16-30**
3. Rezin Politik dan Problem Pembangunan di Indonesia  
**NURAINY LATUCONSINA** \_\_\_\_\_ **31-41**
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah  
**ISRA MUKSIN** \_\_\_\_\_ **42-50**
5. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 3 Salahutu Kabupaten Maluku Tengah  
**YUDI DE FRETES** \_\_\_\_\_ **51-60**
6. “Perilaku Masyarakat Terhadap Budaya Hidup Bersih” (Studi Kasus Pada Masyarakat Negeri Batu Merah Kampung RT 03 / RW 03Kecamatan Sirimau Kota Ambon).  
**BAHRUDIN HASAN** \_\_\_\_\_ **61-70**
7. Program Jamkesmas di Puskesmas Tomalehu Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)  
**ILYAS IBRAHIM** \_\_\_\_\_ **71-80**
8. Penegakan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik yang Berkualitas Di Kantor Kecamatan Sirimau Kota Ambon  
**HEIN EDUARD SIMATAUW** \_\_\_\_\_ **81-90**
9. Efektifitas Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2dtk) Di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah  
**SITI GAIF NINGKEULA** \_\_\_\_\_ **91-106**
10. Analisa Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Kecamatan Pulau Pulau Kur Kota Tual  
**LUSIA RENTANUBUN** \_\_\_\_\_ **107-139**
11. Peran Institusi Lokal dalam Mencegah Konflik Sosial antar Komunitas Islam dan Kristen di Desa Waihatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat  
**ISHAKA LALIHUN** \_\_\_\_\_ **140-166**

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 3 SALAHUTU  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

Oleh :  
YUDI DE FRETES

Abstrak

Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat capaian pembangunan Sumber Daya Manusianya, bahkan pendidikan menjadi domain utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Setiap negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa terkecuali, Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Evaluasi Program, BOS

A. Pendahuluan

Visi Pendidikan Nasional adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab segala tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun langkah-langkah kebijakan yang diambil Pemerintah dalam mewujudkan visi tersebut antara lain;

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Meningkatkan mutu pendidikan yang mempunyai daya saing tingkat nasional, regional maupun internasional
3. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global

4. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini, mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral
5. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan
6. endorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini Pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, saranaprasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, selain faktor internal tantangan yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada era globalisasi pada abad ke- 21 ini adalah bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Hanya dengan bermodalkan manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing suatu bangsa akan mampu bermitra dan berkompetisi pada tataran global. Pada hal kita tahu bahwa gambaran umum mutu Sumber Daya Manusia Indonesia sebagaimana dilaporkan oleh UNDP setiap tahun menunjukkan tingkat pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia ternyata masih memprihatinkan, demikian juga peringkat Indeks Pertumbuhan Daya saing Indonesia masih sangat rendah belum sesuai yang kita harapkan, kondisi ini adalah sebuah realitas yang menjadi isyarat bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia harus bekerja keras secara terus menerus dan konsisten meningkatkan mutu pendidikan manusia dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu wahana dalam pembangunan manusia Indonesia yang cerdas, unggul dan berdaya saing.

B. Pembahasan

- C. Searah dengan tujuan pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan langkah-langkah reformasi atau menyempurnakan sistem pendidikan yang meliputi : (1) Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut harus ada pendidikan yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik sehingga terjadi pergeseran paradigma proses pendidikan dari paradigma pengajaran keparadigma pembelajaran, Paradigma pengajaran yang menitikberatkan peran pendidik dalam menstranformasi pengetahuan bergeser keparadigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya, (2) Perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumbernya pembangunan menjadi paradigma manusia sebagai subyek pembangunan secara utuh.
- D. Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar oleh karena itu dalam kurun waktu 2004-2009, pembangunan pendidikan diarahkan meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan sembilan tahun dan pemberian akses yang lebih besar atau leluasa kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang menjangkau layanan pendidikan.

- E. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya, pemerintah melalui kebijakannya wajib memberikan layanan pendidikan gratis bagi masyarakat yang sementara terpuruk daya belinya sebagai akibat dan kenaikan harga BBM. Untuk itu, program kompensasi subsidi bahan bakar minyak (PKPSBBM) untuk bidang pendidikan perlu dilanjutkan sehingga masyarakat tidak merasakan bahwa pendidikan sebagai sebuah beban hidup yang sangat menghimpitkan mereka ditengah-tengah kemahalan semua kebutuhan hidup lainnya.
- F. Secara umum program bantuan operasional sekolah adalah merupakan kebijakan pemerintah. Untuk itu sebuah kebijakan, keberhasilannya dapat dikaji dan dua perspektif yang berbeda yaitu dan tinjauan proses (implementasi) dan hasil (outcome) (Agus Dwiyanto, 1995, 1).
- G. Perspektif yang pertama menekankan pada eksistensi antara pelaksanaan program dengan policy guidelines. Menurut perspektif ini, suatu program pemerintah dikatakan berhasil kalau pelaksanaan program itu sesuai dengan policy guidelines yang telah ditentukan. Dan tinjauan outcome, suatu program dapat dinilai berhasil kalau program itu menghasilkan seperti yang diinginkan. Suatu program atau kebijakan mungkin saja berhasil dilihat dan sudut proses tetapi saja dapat dikatakan gagal bila ditinjau dan dampak yang dihasilkannya.
- H. Sebagai suatu lembaga relugasi permasalahan publik, pemerintah mempunyai peranan dan fungsi yang signifikan dalam proses planning, organizing, implemantasi maupun evaluasi dan suatu program yang dilaksanakannya atau terhadap sebuah kebijakan public. Oleh sebab itu, pemerintah diberi kewenangan yang cukup secara politik demi merumuskan berbagai kebijakan publik dalam wilayah kekuasaannya dengan memperhitungkan secara akurat kompleksitas kebutuhan masyarakat serta berorientasi kepada kepentingan masyarakat sehingga dapat meningkatkan volume servis publik melalui kebijakan yang tepat guna dan berdaya guna.

Untuk memperjelas dan memberi pemahaman tentang permasalahan yang diteliti penulis hendak mendekatkannya dengan berbagai teori menyangkut kebijakan. Hal ini dikarenakan program pemerintah dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana melalui program ini, Pemerintah memberikan dana ke-sekolah-sekolah antara lain SMP Negeri maupun SMP swasta merupakan bagian dari suatu kebijakan yang berciri/bersifat membagi (distributive).

### C. Penutup

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus memberikan gambaran tentang hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 3 Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.. Untuk itulah kemudian dirumuskan masalah "Bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 3 Salahutu Kabupaten Maluku Tengah telah tercapai berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan?".

Setelah dilakukan perumusan indikator dan dioperasionisasikan kedalam bentuk pertanyaan untuk menjaring jawaban tentang variabel yang diteliti dari para responden. Dan dalam pelaksanaan analisis data kualitatif bertujuan pada penggalian makna, penggambaran, penjelasan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing. Lebih lanjut hasil penelitian pelaksanaan program BOS pada SMP. Negeri 3 Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya pelaksanaan program BOS tahun 2010 oleh lembaga pendidikan yakni sekolah SMP.Negeri 3 Kabupaten Mauluku Tengah telah dilaksanakan dengan baik artinya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum Buku Panduan BOS. Meskipun demikian hasil penelitian telah mengungkap masih terdapat beberapa kelemahan yang kiranya perlu mendapatkan perhatian bagi Kepala Sekolah sebagai penerima sekaligus pengelola dana BOS.
2. Berdasarkan RAPBS dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan BOS SMP Negeri 3 Salahutu terungkap ternyata dari jumlah siswa/siswi keluarga miskin berkisar 12 % - 23 % dari total siswa, dari total siswa miskin tersebut oleh sekolah belum dapat sepenuhnya mendapatkan layanan yang memadai dan akan dilakukan secara bertahap, hal ini dikarenakan terbatasnya sumber dana yang digunakan operasional sekolah. Sumberdana sekolah yang berasal dari orang tua/wali siswa, bantuan APBD Kabupaten belum sebesar yang diharapkan, begitu pula dari dana BOS belum dapat menjangkau memberikan layanan bagi siswa miskin sesuai petunjuk penggunaannya secara keseluruhan. Hal ini juga diperkuat hasil wawancara dengan beberapa Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah yang ada bahwa meskipun dana BOS belum cukup untuk seluruh operasional sekolah, akan tetapi sudah sangat membantu
3. Bentuk layanan terhadap siswa miskin masih terbatas pada pemberian beasiswa (khusus) yaitu pembebasan biaya SPP ( Rp. 55.000 – Rp. 60.000) dan Sumbangan BP.3 yang besarnya ditentukan oleh komite sekolah. Dan sampai saat sekolah belum dapat memikirkan bantuan transportasi bagi siswa

keluarga miskin karena terbatasnya dana yang tersedia untuk operasional oleh sekolah. Disamping itu, berbagai kebutuhan sekolah tidak dapat diselenggarakan tepat pada waktunya karena dana yang diterima sekolah mengalami keterlambatan berkisar 3 – 4 bulan.

4. Hasil kajian dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan BOS ternyata dana BOS telah memberikan andil yang sangat besar terhadap pendidikan di daerah, berdasarkan hasil kajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BOS dari sekolah, ternyata dana BOS menopang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) rata-rata 25% - 30% dari jumlah rencana anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan oleh sekolah dan hal ini berlangsung sesuai pedoman atau petunjuk penggunaan dana BOS yang diberlakukan selama ini.



## SARAN

Bertolak dari uraian kesimpulan penelitian diatas, maka beberapa hal yang dapat di sarankan adalah sebagai berikut :

1. Dalam pemanfaatan dana BOS agar lebih baik dan terarah lagi kedepan maka penggunaannya hendaknya di dasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak sekolah dengan komite sekolah setempat sebelum sasaran lain dipenuhi hendaknya diwujudkan sasaran awal dari program ini yakni, membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu agar mereka memperoleh pendidikan dasar yang lebih bermutu hingga tamat sekolah
2. Agar program BOS secara efektif dapat mendukung kelancaran proses belajar mengajar hendaknya pencairan dana BOS oleh Pemerintah dilakukan secara tepat waktu yaitu dilakukan tiap triwulan dan pencairan dana BOS dilakukan pada awal bulan. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan operasional sekolah tidak mengalami hambatan sehingga kegiatan belajar mengajar akan dapat berjalan efektif.

Searah dengan tujuan program BOS yaitu dalam rangka pembebasan siswa miskin/tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
- Agus Dwiyanto, Evaluasi Program & kebijakan pemerintah, pusat penelitian kependudukan UGM, Yogyakarta, 1995
- Badjuri Abdul Kahar dan Teguh Yuwono, 2002, Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Beni Setiawan, 1999, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Jogjakarta.
- Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah, PKPS-BBBM Bidang Pendidikan, Depdiknas & Depag, 2006
- Chester I Bernard, The Function of The Executive, Harvard University Press, 1985, hal. 35

- Djudju Sudjana, 2006, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah, Rosdakarya.
- Dwidjowijoto Riant Nugroho, 2006, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, PT Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta.
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005, Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program, Edisi Revisi, PT Rosdakarya, Bandung.
- E. Hugh Heelo dan Oberli Silalahi, beberapa aspek kebijakan Negara, liberty, yogyakarta, 1989
- Gibson et el, oleh Soewarno Handyaningrat, dalam Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta, 1985
- Guba E Dan Lincoln, 1981, Efectiffe Evaluation, San Fransisco, Jossey Bass Publisher.
- Gutama, 2006, Kebijakan dan Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dalam Peningkatan Kecerdasan Anak Usia Dini, Makalah.
- Islamy, M. Irfan, 1994, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Cetakan Ketujuh : Bumi Aksara, Jakarta.
- Komaruddin, Ensiklopedia Manajemen, Alumni Bandung, 1979
- Oberlin Silalahi, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara, Liberty, Yogyakarta 1989,
- Prosending Men. PAN, 2006 " Reformasi Birokrasi dalam rangka menghadapi Daya Saing Dalam Era Global "
- Rachbini, J Didik. Arah Kebijakan BBM, Hambatan Terbesar Dari Proses Formulasinya, Harian Kompas, Senin Agustus 2005, hal. 21. (kutipan)
- Rengifurwarin dkk, Bahan Ajar Kebijakan Pemerintahan, Fisip Unpatti, Ambon, 1997,
- Sondang P. Siagian, Pokok-Pokok Manajemen Kepemimpinan, Gunung Agung, Jakarta 1988
- Susilo Martoyo, Efektivitas Organisasi, Gramedia, Jakarta 1985, hal. 56
- Soerjadi F.X, Pokok-Pokok Manajemen Kepemimpinan, P.T Gunung Agung, Jakarta 1998,
- Subarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, 2007, Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1994, Hukum dan Kebijakan Publik, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Surjadi, Ace, 2006, Kebijakan Pemerintah di bidang Bantuan BOS Pendidikan Dasar Makalah, Jakarta.
- The Lian Gie, Buletin Tentang Efektivitas Bagi Aparatur Negara, Pembinaan Administrasi Negara, UGM 1987,
- Utomo, Warsito, 2006, Administrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik, Edisi/Cetakan I, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Wawasan, Tanggal 20 Juni 2007 Menanggapi Pelaksanaan BOS di Kota Semarang.
- Wibowo Samudra, Cs, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Winarno, Budi, 2004, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Edisi/Cetakan Kedua, Media Pressindo, Jogjakarta.
- , 2003, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta.
- , 2010, Data, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tengah.